

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan moneter memegang peranan penting dalam kebijakan ekonomi makro suatu negara, dengan sasaran utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menjaga harga-harga, serta mencapai pemerataan pembangunan. Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral, bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satunya diukur melalui tingkat inflasi yang terkendali. Sejak 2005, BI menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) dengan sistem nilai tukar mengambang, menjadikan inflasi sebagai fokus utama. Efektivitas kebijakan moneter di Indonesia seringkali diuji oleh berbagai krisis ekonomi. Krisis finansial 1997-1998 menjadi momentum transformasi kebijakan moneter menuju sistem yang lebih berbasis pasar dan transparan. Krisis global 2008 mengajarkan pentingnya respons kebijakan yang cepat dan tepat untuk meminimalkan dampak negatif pada perekonomian. Pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan kerjasama yang lebih baik dalam menghadapi krisis 2008 dibandingkan sebelumnya.

Kebijakan moneter merupakan elemen penting dalam manajemen makroekonomi dalam perekonomian terbuka, yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan memengaruhi berbagai variabel ekonomi (Khaysy Srithilat & Gang Sun, 2017). Secara umum, kebijakan moneter diyakini memiliki dampak pada variabel makroekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, pertumbuhan produk domestik bruto, serta keseimbangan neraca pembayaran di negara berkembang (Very & Wisnu, 2021).

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2004-2023. Meskipun secara umum terjadi tren peningkatan namun, terdapat beberapa tahun di mana nilai PDB mengalami perlambatan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti

akpastian global, krisis ekonomi, dan pengaruh variabel makroekonomi ya.

Selain pada sektor finansial, kebijakan moneter juga memiliki peran ng dalam mendukung pertumbuhan sektor rill yang mana ini mencakup



produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Kebijakan moneter mempengaruhi sektor keuangan melalui perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham, serta mempengaruhi perilaku menabung, kredit, dan investasi. Selanjutnya, efek dari perubahan perubahan di sektor keuangan tersebut merambat ke sektor riil dan mempengaruhi variabel-variabel seperti konsumsi, investasi, perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi yang menjadi tujuan utamanya (Warjiyo, 2003) dalam jurnal yang ditulis oleh (Alya, et al, 2024). Perkembangan sektor moneter diharapkan mampu merangsang pertumbuhan disektor riil. Pertumbuhan di sektor riil merupakan 4 sinyallemen yang baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar, kebijakan-kebijakan ini dapat mempengaruhi investasi dan konsumsi, yang merupakan dua pilar utama pertumbuhan ekonomi. Ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga, biaya pinjaman akan meningkat, sehingga mengurangi akses perusahaan dan konsumen terhadap kredit. Akibatnya, sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan dari bank, seperti sektor properti dan manufaktur, dapat mengalami penurunan aktivitas ekonomi (Muhammad & Diah, 2013).

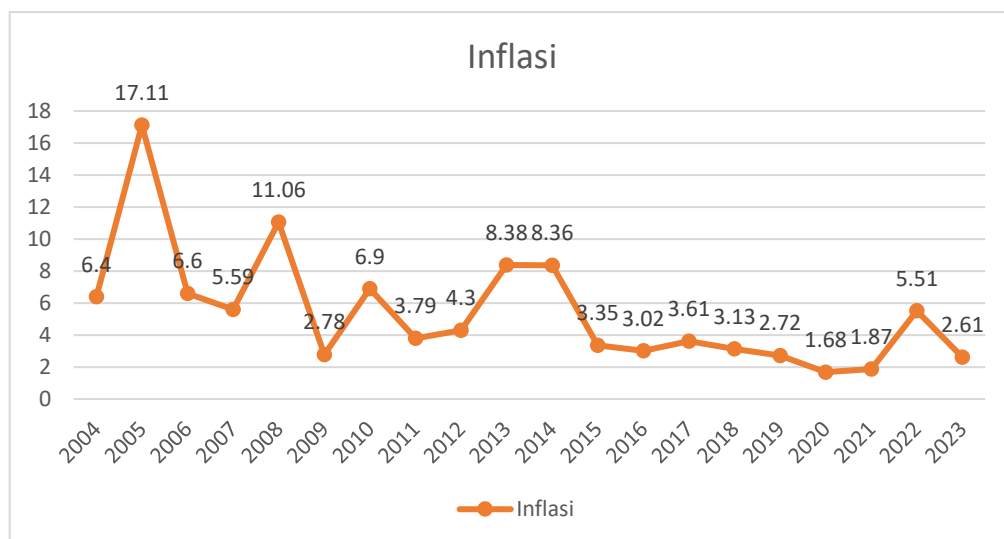
Kebijakan moneter sangat penting bagi negara Indonesia, ini dikarenakan kebijakan moneter memiliki sasaran jangka pendek yaitu untuk menjaga keseimbangan makro, yaitu agar tercapai laju inflasi yang rendah, tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi serta neraca pembayaran yang seimbang. Untuk mencapai tujuan akhir, terdapat jeda waktu yang cukup lama antara implementasi kebijakan moneter dan dampaknya terhadap ketiga aspek yang telah disebutkan. Oleh karena itu, diperlukan sasaran lain untuk mempercepat pengamatan sebagai indikator awal dampak suatu kebijakan. Terdapat beberapa sasaran yaitu, tingkat suku bunga yang stabil dimana hal ini mencerminkan kondisi pasar uang yang tenang dan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Suku bunga dikendalikan agar berada dalam kisaran (suku bunga minimum dan maksimum) yang diinginkan atau



jetkan oleh otoritas moneter, jumlah uang beredar dengan asumsi dasar pandangan ini adalah bahwa jumlah uang yang beredar mempengaruhi suku masyarakat dalam membelanjakan atau membelanjakan barang dan serta nilai tukar yang stabil guna menjaga tingkat inflasi dan membantu

menjaga harga barang tetap terkendali. Selanjutnya, fluktuasi pengeluaran masyarakat akan menentukan perkembangan harga dan output (Boediono 1998).

Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Inflasi yang berada pada tingkat yang wajar dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang melebihi batas akan memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Celil et al., 2016). Selain itu, tingkat inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.



Sumber Data: Bank Indonesia dan BPS

Gambar 1.1 Laju Inflasi Indonesia Tahun 2004-2023

Laju inflasi Indonesia pada tahun 2004 hingga tahun 2023 memiliki angka yang fluktuatif, ini berarti bahwa terjadi ketidakseimbangan selama periode tahun 2004 hingga 2023. Pada tahun 2004 inflasi di Indonesia mencapai angka 6,40 persen dan mengalami peningkatan yang sangat besar pada tahun 2005 dengan angka mencapai 17,11 persen, ini merupakan tingkat inflasi tertinggi sejak krisis moneter di tahun 1998, beberapa faktor yang menyebabkan lonjakan inflasi ini ialah kenaikan harga bahan bakar minyak 1) secara signifikan yang berdampak langsung pada biaya transportasi produksi sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya



serta ekspektasi inflasi dan ketidakstabilan nilai tukar yang turut memperburuk kondisi inflasi (Badan Pusat Statistik, 2005). Pada tahun 2006 hingga 2007, tingkat inflasi di Indonesia mengalami penurunan sehingga di tahun 2007 tingkat inflasi sebesar 5,59 persen. Pada tahun 2008 merupakan tingkat inflasi tertinggi dalam rentang tahun 2009-2023 yaitu sebesar 11,06 persen, ini disebabkan oleh krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian di Indonesia. Hal ini berdampak pada kenaikan harga komoditas terutama bahan makanan seperti beras dan minyak goreng. Meskipun ada tantangan krisis global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008 tercatat mencapai 6,5 persen. Ini didorong oleh stabilitas makroekonomi dan peningkatan investasi.

Pada tahun 2009, inflasi berhasil diturunkan hingga mencapai angka 2,78 persen namun, kembali mengalami peningkatan di tahun 2010 dan kembali terkendali di tahun 2011-2012. Pada tahun 2013 hingga 2014, inflasi kembali mengalami kenaikan yang tinggi yaitu mencapai 8,38 persen di tahun 2013, dan 8,36 persen di tahun 2014 hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks seluruh kelompok pengeluaran seperti, kelompok bahan makanan sebesar 0,79 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,73 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,44%, kelompok sandang sebesar 0,17 persen, kelompok kesehatan 0,16 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,06 persen dan kelompok transportasi, komunikasi serta jasa keuangan mencapai 0,56 persen. Sedangkan, untuk tahun-tahun berikutnya tingkat inflasi cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2020 dan 2021 yang hanya mencapai 1,68 persen dan 1,87 persen (Badan Pusat Statistik, 2014). Hal ini dikarenakan Covid-19 yang mana menimbulkan banyak masalah perekonomian dan juga menciptakan banyaknya pengangguran di tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2022 inflasi kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi setelah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kenaikan harga global dan gangguan rantai pasokan akibat Covid-19. Tahun 2023 inflasi tercatat mencapai 2,61 persen ini dikarenakan adanya pemulihan yang sudah berjalan sejak tahun 2022 diantaranya ialah dengan cara mengurangi tekanan pada harga barang dan jasa serta kebijakan moneter yang diterapkan



oleh Bank Indonesia menjadi lebih ketat untuk mengendalikan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga, hal ini dilakukan untuk menahan inflasi dan stabilisasi nilai tukar (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selama periode tahun 2004 hingga 2023, kondisi suku bunga Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2004, suku bunga mencapai angka 7,34 persen dan mengalami kenaikan pesat di tahun 2005 dengan angka mencapai 12,75 persen. Ini merupakan imbas hasil akibat kenaikan inflasi yang menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) serta sebagai respons terhadap kondisi tersebut Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara signifikan dengan harapan dapat mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat sehingga dapat menurunkan tekanan inflasi dan menstabilkan nilai tukar (Bank Indonesia, 2005). Pada tahun 2006 hingga 2007, suku bunga mengalami penurunan dengan angka tingkat suku bunga sebesar 8 persen di tahun 2007. Pada tahun 2008, suku bunga mencapai 9,25 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 yang hanya sebesar 8 persen. Bank Indonesia menaikkan suku bunga dikarenakan untuk menekan inflasi yang sangat tinggi di tahun 2008 akibat dari krisis ekonomi global dan mulai mengalami penurunan di tahun 2009 hingga 2012. Pada periode tahun 2013-2015, suku bunga mencapai angka 7 persen, lalu mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017 dengan angka 4% dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2018 dan di tahun 2019 hingga 2023 mengalami naik turun yang tidak begitu signifikan. Tahun 2020 serta 2021, suku bunga hanya mencapai angka 3 persen. Hal ini dikarenakan masa Covid-19 dan pemulihan yang mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara drastis, dikarenakan hal tersebut Bank Indonesia (BI) mengambil langkah untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebagai upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Menurut teori preferensi likuiditas yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam jurnal yang ditulis oleh (Rifki & Rosul, 2024), suku bunga berperan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam menentukan alokasi dana antara konsumsi dan tabungan. Ketika suku bunga meningkat, masyarakat cenderung lebih memilih menabung karena imbal hasil yang diperoleh menjadi lebih menarik.



Peningkatan tabungan ini berdampak pada penurunan konsumsi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini sesuai dengan penelitian oleh Mishkin (1996), yang menjelaskan bahwa perubahan suku bunga memengaruhi permintaan agregat melalui pengaruhnya pada konsumsi. Sebaliknya, jika suku bunga menurun, masyarakat lebih terdorong untuk mengurangi tabungan dan meningkatkan konsumsi, sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih dinamis. Milton Friedman (1957). menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh ekspektasi pendapatan di masa depan dan biaya peluang menabung. Saat suku bunga rendah, biaya peluang menabung menurun, mendorong peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi. Selain itu, suku bunga yang rendah juga mendorong konsumsi dan pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena adanya ketidakseimbangan suku bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada perekonomian.

Data jumlah uang beredar (JUB) periode tahun 2004 hingga 2023 mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada rentang tahun 2004 hingga 2018, Jumlah Uang Beredar (M1) terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 654 Milyar. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakpastian global yang mengakibatkan penyaluran kredit menjadi melambat. Untuk tahun 2020 hingga 2023, jumlah uang beredar (M1) terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Menurut Friedman, menjaga pertumbuhan jumlah uang beredar tetap stabil dan sejalan dengan peningkatan output riil akan membantu menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (A'isyah, et al, 2022). Penelitian dari Nacita et al., 2021 menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Risky et al., 2019 menjelaskan bahwa dalam analisis jangka pendek dan jangka panjang, jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di



nesia

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah nilai dari mata uang negara yang bersangkutan. Menurut Marni, 2006 dalam il yang ditulis oleh (Ayunia, 2014), nilai tukar atau kurs adalah jumlah uang

domestik yang harus dikeluarkan, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai tukar menjadi salah satu variabel penting dalam perekonomian terbuka karena dapat memengaruhi variabel lain seperti tingkat harga, suku bunga, neraca pembayaran, serta transaksi berjalan. Menurut teori Mundell-Fleming dalam Mankiw, 2003, terdapat hubungan negatif antara nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi nilai tukar, maka ekspor neto (selisih antara ekspor dan impor) akan menurun, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan jumlah output dan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Ayunia, 2014 menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Nacita et al., 2021 yang menjelaskan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia (2004-2023).”**

1.2 Rumusan Masalah

Ketidakstabilan inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar dan nilai tukar sebagai aspek dalam kebijakan moneter dapat mengakibatkan stabilitas ekonomi menjadi terganggu, oleh karena itu kebijakan moneter perlu dirancang untuk mencapai keseimbangan antara inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, dan nilai tukar guna meningkatkan PDB yang juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap produk domestic bruto di Indonesia pada periode tahun 2004 hingga 2023?
2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap produk domestic bruto di Indonesia pada periode tahun 2004 hingga 2023?
3. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap produk domestic bruto Indonesia pada periode tahun 2004 hingga 2023?



4. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada periode 2004 hingga 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari inflasi terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada periode tahun 2004 hingga 2023
2. Untuk mengetahui pengaruh dari suku bunga terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada periode tahun 2004 hingga 2023
3. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah uang beredar terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada periode tahun 2004 hingga 2023
4. Untuk mengetahui pengaruh dari nilai tukar terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada periode tahun 2004 hingga 2023

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau literatur ilmu dalam melihat seberapa besar pengaruh dari inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar serta nilai tukar terhadap produk domestik bruto di Indonesia khususnya dalam rentang waktu yaitu tahun 2004-2023.
 - b. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menguji relevansi teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan dan dapat mengemangkan potensi yang dimiliki oleh penulis.
 - b. Bagi Masyarakat



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pembaca baik masyarakat secara umum maupun akademisi yang ingin mengetahui terkait dengan analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2004-2023 dan

penelitian ini juga diharapkan mampu membantu dalam mengembangkan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan topik ini.

c. Bagi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dari pemangku kepentingan kebijakan, seperti pemerintah dalam mengambil keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu, umumnya satu tahun. Dalam kondisi ekonomi yang berkembang pesat, peningkatan kesempatan kerja mendorong naiknya pendapatan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang melampaui kapasitas produksi ekonomi, sehingga memicu inflasi. Ketika masyarakat terus meningkatkan pengeluaran, permintaan agregat pun bertambah. Untuk memenuhi permintaan ini, perusahaan akan meningkatkan produksi, yang pada akhirnya menaikkan PDB riil dan dapat memperkuat tekanan inflasi (Sukirno, 2010). Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), yang mencakup total produksi barang dan jasa dalam suatu periode di wilayah tertentu. PDB Nominal menghitung nilai produksi tanpa penyesuaian harga, sementara PDB Riil menyesuaikan angka PDB Nominal dengan perubahan harga. Sedangkan, analisis kinerja ekonomi nasional berdasarkan PDB dilakukan melalui tiga pendekatan; yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satu cara yang digunakan adalah dengan melihat tingkat produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi juga dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara berusaha untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonominya dengan cara meningkatkan output secara berkelanjutan melalui penyediaan barang modal, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan yang harus dihadapi

setiap negara, terutama negara-negara berkembang yang sering kali mengalami hambatan-hambatan. Berbagai faktor lainnya yang dapatengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya seperti, sumber daya, sumber daya manusia, serta faktor-faktor non-ekonomi, seperti sistem



kelembagaan yang ada di setiap negara. Perbedaan kondisi ini menjadikan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antarnegara menjadi bervariasi (Anastia, et al, 2021).

Hal ini berarti terjadi peningkatan pendapatan nasional yang ditandai dengan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, salah satu indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menghasilkan output (barang dan jasa) diperlukan input dalam proses produksi yaitu modal dan tenaga kerja, seperti yang dijelaskan dalam Teori Pertumbuhan Solow-Swan yang didasarkan pada Fungsi Produksi Cobb-Douglas. Faktor-faktor produksi tersebut meliputi modal, tenaga kerja, dan teknologi sebagai variabel eksternal (Tania, R., 2022). Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia akan terus dilakukan melalui pembangunan yang terencana dan bertahap, sehingga stabilitas ekonomi dapat tercapai. Pembangunan nasional yang dilakukan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul masalah baru seperti pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan, maka tingkat pengangguran akan terus meningkat dan berbagai masalah lain akan muncul (Alwindo, et al, 2024).

Teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan menekankan bahwa keseimbangan dalam perekonomian umumnya dapat tercapai melalui mekanisme pasar tanpa perlu keterlibatan pemerintah secara langsung. Intervensi pemerintah biasanya hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Model ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari tiga faktor utama: penambahan modal, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam kerangka Solow, kemajuan teknologi dipandang sebagai variabel eksogen yang berubah seiring waktu, bebas dari pengaruh faktor ekonomi lainnya (Solow, R. M., 1956). Sedangkan, Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar dalam



jurnal yang ditulis oleh (Sanusi, et al, 2022), menekankan bahwa investasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh dua karakteristik investasi, yaitu kemampuannya untuk menciptakan pendapatan dan meningkatkan kapasitas produksi perekonomian melalui penambahan stok modal. Untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, diperlukan peningkatan investasi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya membutuhkan pertumbuhan pendapatan riil yang konsisten pada tingkat yang cukup untuk memastikan pemanfaatan penuh dari kapasitas modal yang sedang tumbuh.

2.1.2 Inflasi

Menurut Boediono dalam jurnal yang di tulis oleh (Natasya & Putu, 2023) inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang menandai kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus. Inflasi di definisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Meskipun para ahli ekonomi memberikan definisi yang berbeda-beda, namun mereka semua sepakat mengenai kenaikan harga yang cenderung meningkat secara terus menerus.

Inflasi adalah salah satu gejala ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian karena pengaruhnya yang cukup luas terhadap kondisi perekonomian, khususnya di Indonesia. Dari perspektif moneter, Bank Sentral Republik Indonesia menetapkan kebijakan guna mengendalikan tingkat inflasi melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter (Anas & Ali, 2018). Inflasi dapat terjadi karena dua hal. Pertama, inflasi yang timbul karena kenaikan permintaan masyarakat yang terlalu kuat (demand-pull inflation) terhadap barang dan jasa. Hal ini dapat terjadi apabila pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak diiringi dengan pertumbuhan produktivitas yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara peningkatan permintaan yang lebih besar dari penawaran. Seperti halnya pandangan teoritis Keynes mengenai inflasi berdasarkan teori makro, menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena masyarakat hidup di luar kemampuan ekonominya. Suatu

aan dimana jumlah permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa bihi jumlah output yang tersedia atau yang dihasilkan (Inflation Gap) akan jakibatkan kenaikan harga-harga secara umum. Namun, jika penurunan



inflasi lebih besar dibandingkan pertumbuhan uang, daya beli, serta permintaan agregat, maka daya beli masyarakat akan meningkat secara bertahap. Peningkatan daya beli ini dapat mendorong permintaan agregat dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi untuk kembali menguat (Amanus, 2017). Selain itu, teori *cost push inflation* menjelaskan bahwa tekanan inflasi dapat muncul akibat kenaikan biaya produksi (misalnya upah minimum dan harga input), sementara teori *demand pull inflation* menyatakan bahwa permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi (output gap positif) akan menimbulkan inflasi

Model Keynesian menjelaskan hubungan antara Permintaan Agregat (AD) dan Penawaran Agregat (AS), yang secara efektif menggambarkan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan output, seperti ekspektasi ekonomi, dinamika tenaga kerja, perubahan harga faktor, serta kebijakan moneter dan fiskal. Kurva AD-AS dalam jangka pendek menunjukkan bahwa peningkatan inflasi cenderung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini dapat berubah menjadi negatif, di mana kenaikan inflasi justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Erika, 2020)

2.1.3 Suku Bunga

Suku bunga adalah elemen krusial dalam perbankan, sejalan dengan pandangan ekonomi klasik. Bunga membantu perputaran ekonomi dengan memastikan pengembalian modal kepada pemiliknya dan mengendalikan jumlah uang beredar. Suku bunga memiliki peran penting dalam ekonomi mikro dan makro. Meskipun memberikan manfaat, suku bunga juga memiliki sisi negatif, terutama kenaikan inflasi. Kenaikan suku bunga dan inflasi dapat meningkatkan pengangguran dan memperlambat ekonomi (Beureukat, 2022).

Bank sentral menggunakan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Sementara itu, penurunan suku bunga menurunkan biaya pinjaman, mendorong investasi, meningkatkan pengeluaran konsumen, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, jelas bahwa kebijakan suku bunga tinggi dapat memberikan dampak



negatif pada kegiatan ekonomi. Tingginya suku bunga meningkatkan biaya pinjaman yang mengurangi daya saing ekspor di pasar global. Hal ini membuat para pelaku bisnis menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi di dalam negeri, dan mengakibatkan penurunan produksi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi (Indriyani, 2016).

Menurut (Indriyani, 2016), suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi yang selalu diawasi dengan ketat karena dampaknya yang luas. Suku bunga secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan perekonomian. Umumnya, suku bunga dinyatakan sebagai persentase tahunan yang dibebankan pada jumlah uang yang dipinjam. Pada dasarnya, suku bunga adalah harga. Seperti harga lainnya, suku bunga menjadi pusat perhatian di pasar, terutama pasar uang dan pasar modal. Suku bunga dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian.

Menurut Mishkin (2001), kenaikan suku bunga memiliki dampak langsung pada perekonomian melalui dua mekanisme utama. Pertama, kenaikan suku bunga meningkatkan biaya modal, yang menyebabkan penurunan konsumsi. Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa kebijakan moneter yang diterapkan disertai dengan kenaikan suku bunga dan kondisi (*ceteris paribus*). Penurunan konsumsi ini pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan penawaran agregat. Kedua, suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan bunga bagi para penabung. Di satu sisi, hal ini meningkatkan daya beli (*income effect*), namun di sisi lain juga menurunkan konsumsi karena masyarakat lebih memilih untuk menabung daripada membelanjakan uangnya (*substitution effect*). Dampak keseluruhan dari kedua efek ini (*net effect*) akan menentukan tingkat konsumsi masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian.

2.1.4 Jumlah Uang Beredar



Menurut (Annisa et al., 2021), uang adalah suatu benda yang memiliki nilai tertentu dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi di suatu wilayah. Jumlah uang yang beredar

merupakan hasil kali antara uang primer dan uang giral. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diketahui melalui proses pasar. Selain itu, jumlah uang beredar juga berkaitan dengan suku bunga deposito, semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka investasi menjadi lebih menarik dibandingkan dengan menyimpan dana dalam bentuk tabungan. Definisi jumlah uang beredar terbagi menjadi dua kategori yaitu; uang dalam arti sempit (M1), ini adalah uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi, serta uang dalam arti luas (M2), ini termasuk uang dalam arti sempit (M1) ditambah dengan deposito tabungan.

Jumlah uang beredar mengacu pada uang yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, definisi ini terus berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Di negara maju, cakupan definisi uang beredar umumnya lebih luas dan kompleks dibandingkan negara berkembang (NSB). Definisi yang paling sempit, yang sering disebut sebagai narrow money, adalah daya beli yang dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran. Definisi ini juga dapat diperluas untuk mencakup alat pembayaran lain yang mendekati “uang”, seperti deposito berjangka dan tabungan. Dalam konteks ini, uang telah memenuhi fungsinya sebagai alat tukar (Pohan, 2008) dalam jurnal yang ditulis oleh (Susmiati, 2021).

Teori moneterisme yang dikembangkan oleh ekonom Milton Friedman yang ditulis dalam jurnal (A'isyah, et al, 2022) menyoroti peran kunci jumlah uang beredar dalam menentukan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Friedman, menjaga pertumbuhan jumlah uang beredar tetap stabil dan sejalan dengan peningkatan output riil akan membantu menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

2.1.5 Nilai Tukar

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Safira Amanda Novianingrum et al., 2024) mengemukakan bahwa, nilai tukar adalah jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Murni, 2006).

tukar merupakan salah satu indikator penting dalam sistem ekonomi jika karena dapat mempengaruhi variabel ekonomi lainnya seperti harga, bunga, neraca pembayaran, dan transaksi berjalan (Batiz, 1994). asarkan pandangan Keynesian dalam konteks ekonomi terbuka, yang



berasal dari pemikiran John Maynard Keynes pada tahun 1936 dan dikembangkan secara internasional pada tahun 1950-an dan 1960-an, menyatakan bahwa penurunan nilai mata uang domestik (depresiasi) akan membuat produk domestik menjadi lebih murah di pasar asing. Akibatnya, ekspor akan meningkat, sementara harga barang impor akan menjadi lebih mahal bagi konsumen domestik, sehingga mengurangi permintaan impor. Kedua efek ini akan meningkatkan ekspor bersih ($X - M$), yang secara otomatis meningkatkan permintaan agregat dalam persamaan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$. Dalam kerangka ini, pertumbuhan permintaan agregat akan meningkatkan output nasional total, memperluas peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Nilai tukar dapat dipahami sebagai harga mata uang domestik bila dibandingkan dengan mata uang negara lain. Dengan kata lain, kurs atau nilai tukar (exchange rate) merepresentasikan harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar memiliki peran penting dalam perekonomian terbuka, dalam jurnal yang ditulis oleh (Ribut & Daryono, 2022) mengemukakan bahwa hal ini terjadi karena nilai tukar sangat memengaruhi transaksi berjalan serta berbagai indikator makroekonomi. Secara umum, nilai tukar menggambarkan harga relatif suatu mata uang terhadap mata uang asing dan juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk harga atau aset (Krugman, 2005) dalam jurnal (Ribut & Daryono, 2022).

2.2 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.2.1 Hubungan Inflasi dan Produk Domestik Bruto

Inflasi di berbagai negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berbeda. Inflasi, yang mengacu pada penurunan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan komoditas seperti emas atau mata uang asing, perlu dijaga agar tetap stabil pada tingkat yang rendah. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Akibatnya, masyarakat cenderung memprioritaskan bekerja daripada

investasi, karena inflasi dapat berdampak negatif, seperti mengurangi efisiensi dan produktivitas, meningkatkan biaya modal, dan menciptakan ketidakpastian tentang biaya dan pendapatan di masa depan (Wafa R. Salam, 2019).



Inflasi juga memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara, sehingga mengendalikan inflasi agar tetap berada pada tingkat yang rendah merupakan prioritas utama dalam kebijakan ekonomi. Mengelola laju dan tingkat inflasi memainkan peran penting dalam konteks ekonomi makro. Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi menjadi sangat penting karena dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat (Bayu et al., 2021).

Sebagai salah satu negara berkembang terbesar di Asia Tenggara, Indonesia seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola inflasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya pengendalian inflasi di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh berbagai dinamika, seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan nilai tukar, serta situasi politik dan kebijakan fiskal dalam negeri. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi. Hal ini berakibat pada penurunan konsumsi yang merupakan salah satu komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, inflasi yang terlalu rendah juga tidak ideal karena dapat mengindikasikan lemahnya permintaan dan produksi dalam perekonomian (Meilan et al., 2024).

2.2.2 Hubungan Suku Bunga dan Produk Domestik Bruto

Suku bunga merupakan variabel ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial suatu negara (Halifah et al., 2022). Fungsi suku bunga adalah sebagai alat untuk mengatur permintaan dan penawaran mata uang di dalam negeri. Ketika suku bunga berada pada tingkat yang tinggi, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menyimpan sebagian kekayaannya di bank. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, masyarakat lebih cenderung untuk melakukan pembelian (Cecep, 2013). Suku bunga yang rendah juga dapat mendorong peningkatan investasi, pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan PDB yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Suku bunga yang tinggi dapat menarik investor untuk menyimpan dana mereka di sektor perbankan daripada berinvestasi di sektor lain yang mungkin



lebih berisiko, yang mengakibatkan aktivitas di sektor riil menjadi lebih rendah. Meskipun suku bunga perbankan mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut dibatasi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kenaikan suku bunga yang terbatas ini dipengaruhi oleh ketersediaan likuiditas di sektor perbankan yang tidak terlalu ketat. Bank Indonesia akan terus mendukung sektor perbankan dalam menetapkan suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif untuk mendorong pemulihan ekonomi (Bank Indonesia, 2022).

2.2.3 Hubungan Jumlah Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto

Perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pembayaran uang. Ketika membahas lalu lintas pembayaran uang, ini berkaitan dengan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Jika jumlah uang beredar terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar sangat rendah, maka dapat menyebabkan kelesuhan ekonomi. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun (Risky et al., 2019). Berdasarkan teori monetaristik, terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan Jumlah Uang Beredar (JUB). Peningkatan jumlah uang yang beredar per kapita akan mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Apabila jumlah uang beredar melebihi pertumbuhan ekonomi riil, maka hal ini dapat menyebabkan inflasi (Karari & Edy 2020).

Menurut Natsir (2014) dalam jurnal yang di tulis oleh (Risky, et al, 2019) menyebutkan bahwa, jumlah uang beredar memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah uang beredar meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan hipotesis Keynes yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap output PDB dan pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah uang beredar di masyarakat melebihi batas, Bank Indonesia biasanya akan mengambil langkah untuk menurunkan suku bunga. Situasi ini seringkali mendorong investor untuk berinvestasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan output PDB dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, permintaan uang memiliki hubungan negatif dengan output, jika permintaan



uang meningkat, hal ini dapat menyebabkan peningkatan suku bunga, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan output.

2.2.4 Hubungan Nilai Tukar dan Produk Domestik Bruto

Nilai tukar tidak hanya merepresentasikan kekuatan ekonomi suatu negara, tetapi juga memiliki peran krusial dalam menentukan daya saing global, menjaga stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (PDB). Perubahan dalam nilai tukar mata uang terjadi seiring dinamika perekonomian global yang memengaruhi kurva permintaan dan penawaran valuta. Fluktuasi nilai tukar tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja sektor perbankan yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan moneter dan keuangan. Dalam dunia perbankan, nilai tukar menjadi aspek strategis karena banyak institusi keuangan terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan mata uang asing, baik melalui pinjaman dalam valuta asing, investasi, maupun transaksi lintas negara.

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, misalnya, dapat meningkatkan beban utang bank yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas keuangan lembaga tersebut. Sebaliknya, apabila Rupiah menguat, hal ini bisa memperbaiki posisi keuangan bank, meskipun potensi daya saing produk keuangan, khususnya yang berorientasi ekspor, bisa menurun di pasar global (Arifin et al., 2023).

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki permasalahan yang cukup sama dengan penelitian yang sedang dilakukan:

Hasil penelitian Nacita Putri Anzelia, Desmintari, Sugianto (2021) dengan judul penelitian : Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar pada periode 1989-2019 berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika diukur dengan PDB (produk domestik bruto). Nilai tukar memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu semakin tinggi nilai



tukar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penurunan nilai tukar akan menurunkan pertumbuhan ekonomi juga. Inflasi dari tahun 1989 hingga 2019 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika diukur dengan PDB (produk domestik bruto).

Hasil penelitian Very Budiyanto dan Wisnu Wibowo (2021) dengan judul penelitian : Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menyatakan bahwa berdasarkan temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan moneter mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 83,6%. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang beredar (M2) dan nilai tukar merupakan variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada saat yang sama, suku bunga tidak berdampak besar atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor keuangan di Indonesia harus lebih banyak diatur dan diawasi oleh kementerian keuangan dan bank sentral untuk mencapai efisiensi kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama saat menerapkan kebijakan moneter.

Hasil penelitian Hari Winarto, et al (2021), dengan judul penelitian : Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas Jumlah Uang Beredar lebih kecil dari 0,05 yaitu 0.0042 yang artinya hipotesis nol ditolak dan dari hasil uji kointegrasi dapat dilihat bahwa Jumlah uang beredar tidak memiliki hubungan dalam jangka panjang terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Suku Bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas Suku Bunga lebih besar dari 0,05 yaitu 0.8459 yang artinya hipotesis nol diterima dan dari hasil uji kointegrasi dapat dilihat bahwa Suku Bunga tidak memiliki hubungan dalam jangka panjang terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Nilai Tukar berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas Nilai Tukar lebih besar dari 0,05 yaitu 0.8912 yang artinya hipotesis nol diterima dan dari hasil uji kointegrasi dapat dilihat bahwa Nilai Tukar tidak memiliki hubungan dalam jangka panjang terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Inflasi berpengaruh tidak



signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas Inflasi lebih besar dari 0,05 yaitu 0.4956 yang artinya hipotesis nol diterima dan dari hasil uji kointegrasi dapat dilihat bahwa Inflasi tidak memiliki hubungan dalam jangka panjang terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil penelitian Liasulistia Ningsih, et al (2024), dengan judul penelitian: Efektivitas Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan moneter berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat guncangan eksternal maupun internal mengharuskan otoritas moneter sigap dalam menerapkan kebijakan moneter sesuai dengan kondisi perekonomian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa kebijakan moneter berjalan berlawanan arah dengan siklus ekonomi. Adapun faktor lain seperti inflasi dan kemiskinan juga berpengaruh signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana kondisi kemiskinan serta inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

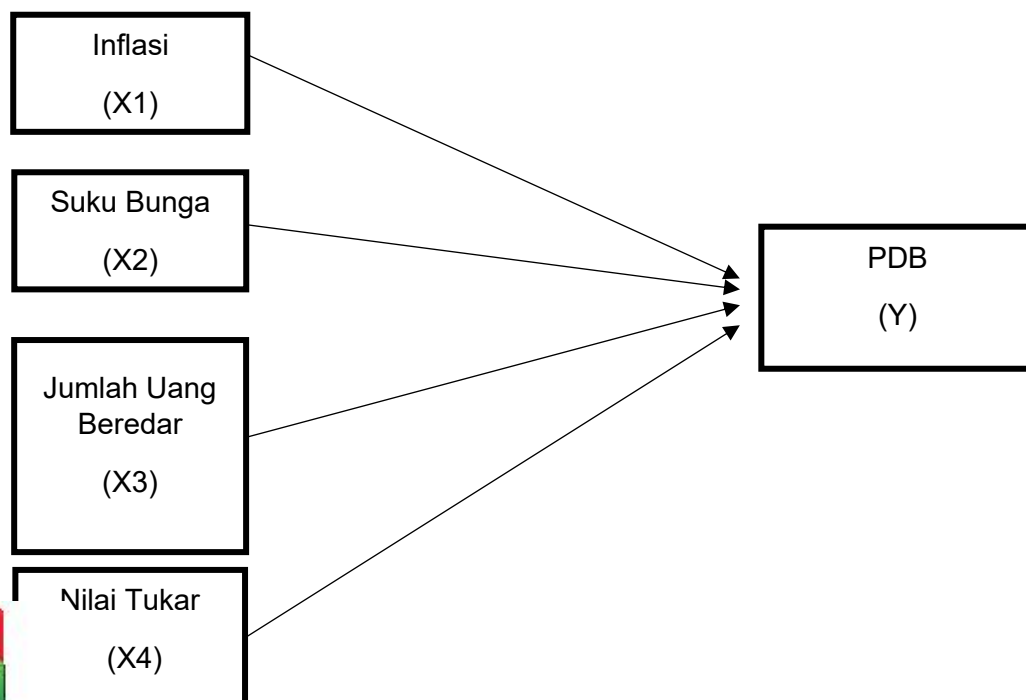
Hasil penelitian Lestari Simanjuntak, et al (2023), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jumlah uang yang beredar, suku bunga, nilai tukar dan inflasi tidak sepenuhnya berdampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia karena terjadi peranan berupa kebijakan moneter yang dapat memicu jumlah uang yang beredar dan pergerakan nilai tukar sehingga inflasi dapat dikendalikan yang tentu berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan temuan dari berbagai hasil penelitian, mengungkapkan bahwa kebijakan moneter mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan. Secara khusus, menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang beredar dan nilai tukar merupakan variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada yang sama, suku bunga tidak berdampak besar atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Hasil penelitian Rony Fauzan Mu'arif & Daryono Soebagyo (2023), dengan judul penelitian Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selama periode 2005–2020, produk domestik bruto mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara signifikan dipengaruhi oleh variabel ekspor dan jumlah uang beredar (JUB), sedangkan variabel impor dan penanaman modal asing (PMA) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam jangka pendek. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), model yang digunakan dinyatakan valid karena memenuhi seluruh uji asumsi klasik dan memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 98,57%, yang berarti model ini mampu menjelaskan hampir seluruh variasi dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah lebih memfokuskan kebijakan pada peningkatan ekspor dan pengelolaan jumlah uang beredar untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini mencakup analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada rentang tahun 2008 hingga 2023.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif terhadap produk domestik bruto (PDB), ini dikarenakan ketika inflasi mengalami kenaikan, harga barang dan jasa akan meningkat, sehingga masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli kebutuhan yang sama dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Penurunan daya beli masyarakat akan mengurangi konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen dalam PDB, sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB. Suku bunga memiliki hubungan yang negatif dengan produk domestik bruto, ketika suku bunga naik, biaya pinjaman juga akan naik. Dengan biaya pinjaman yang meningkat, individu serta perusahaan cenderung mengurangi pengeluaran mereka yang menyebabkan penurunan permintaan agregat yang pada akhirnya juga akan menurunkan nilai PDB. Jumlah uang beredar berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ini karena ketika semakin banyak uang yang beredar, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi mereka.

Jumlah uang beredar berhubungan positif terhadap produk domestik bruto (PDB), ini karena peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan likuiditas dalam perekonomian. Dengan meningkatnya jumlah uang beredar kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan pelaku usaha untuk melakukan investasi juga akan meningkat. Kenaikan konsumsi dan investasi ini akan mendorong peningkatan output nasional yang tercermin dalam kenaikan nilai PDB. Selanjutnya nilai tukar. Nilai tukar memiliki hubungan positif terhadap produk domestik bruto (PDB), ini dikarenakan, depresiasi mata uang domestik akan meningkatkan daya saing ekspor. Ketika barang-barang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, volume ekspor meningkat, sehingga mendorong peningkatan produksi dan output nasional yang tercermin dalam naiknya produk domestik bruto (PDB).

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian pada **Gambar 2.1** maka susun beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:



Diduga inflasi (X1) berpengaruh negatif terhadap produk domestik bruto (PDB) (Y) di Indonesia

2. Diduga suku bunga (X_2) berpengaruh negatif terhadap produk domestik bruto (PDB) (Y) di Indonesia
3. Diduga jumlah uang beredar (X_3) berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto (PDB) (Y) di Indonesia
4. Diduga nilai tukar (X_4) berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto (PDB) (Y) di Indonesia.

